

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Komunikasi politik yang dilakukan oleh aktor politik yaitu Presiden Joko Widodo memang memiliki tim khusus yang ditunjuk untuk menyampaikan konten-konten yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden melalui saluran komunikasi yaitu akun media sosial Instagram @jokowi periode 4 Januari 2016 hingga 23 Maret 2019. Berdasarkan observasi dari 1.141 unggahan di Instagram @jokowi terdapat 23 unggahan membahas mengenai pembagian sertifikat tanah. Pada kolom komentar tersebut diklasifikasikan menjadi dua yaitu komentar mengenai sertifikat tanah dan komentar di luar sertifikat tanah.

Proses komunikasi yang ada pada akun Instagram @jokowi termasuk kedalam komunikasi satu arah, karena pada setiap unggahan di Instagramnya terdapat banyak respons berupa komentar, *likes* dan *view* dari masyarakat, namun tidak satupun respons tanggapan secara langsung dari Presiden Joko Widodo di dalam kolom komentar tersebut, karena akun Instagram @jokowi dikelola oleh tim komunikasi digital Presiden agar informasi yang di sampaikan layak untuk di tayangkan. Komunikasi satu arah yang ada mengakibatkan masyarakat menjadi melakukan komentar tidak sesuai dengan topik unggahan yang ada, serta bagi pemerintahan menjadi tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh masyarakat. Tujuan adanya komunikasi politik adalah agar pesan-pesan yang disampaikan oleh aktor politik yaitu politisi dapat disalurkan ke masyarakat. Jika komunikasi politik yang terjadi hanya satu arah maka tujuan komunikasi politik tidak dapat tersampaikan.

Sama halnya dengan komunikasi politik yang ada pada Instagram @jokowi mengenai proses pembagian sertifikat tanah, respons masyarakat cenderung banyak mengenai komentar-komentar yang tidak sesuai dengan topik yang di unggah. Hal tersebut terjadi karena saluran komunikasi yang tersedia untuk masalah diluar pembagian sertifikat tanah mungkin saja tidak tersedia karena komunikator yaitu pihak

pemerintah tidak dapat memberikan tempat yang tepat untuk masyarakat dapat menyalurkan pendapat mengenai masalah diluar pembagian sertifikat tanah, sehingga masyarakat menjadi komentar tidak sesuai dengan topik yang di sampaikan. Hal tersebut dapat mengakibatkan tujuan komunikasi politik pada saat pembagian sertifikat tanah tidak efektif.

Kepresidenan adalah komunikasi organisasi pemerintah yang merupakan bagian dari komunikasi politik Presiden Joko Widodo. Kementerian Sekretariat Negara berkedudukan langsung dibawah Presiden dan Wakil Presiden, terdapat tiga deputi yang ada di dalamnya salah satunya adalah deputi bidang protokol, pers, media dan informasi yang bertugas untuk memantau dan mengumpulkan berita serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara via telephone dengan staff humas Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 12 November 2020, terdapat penjelasan mengenai bagaimana cara mendapatkan informasi yang ada pada *website* Kementerian Sekretariat Negara. Hal tersebut merupakan salah satu cara komunikasi pemerintahan, yaitu komunikasi pihak pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan informasi. Tidak hanya melalui *website* untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan pemerintahan, melalui media sosial kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat diketahui.

Media sosial merupakan tempat pemerintah dapat dengan cepat dan mudah menyalurkan informasi kepada masyarakat. Salah contoh proses pemberian informasi melalui media sosial adala proses pembagian sertifikat tanah yang ada pada akun Instagram @jokowi, informasi yang ada pada akun tersebut dapat dipertanggung jawabkan karena memang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan informasi-informasi terbaru kepada masyarakat. Tujuan penggunaan media sosial untuk lembaga pemerintahan dibagi dalam empat hal.

Pertama, berbagi (*sharing*) pada proses ini Instagram @jokowi merupakan tempat untuk menyampaikan informasi pembagian sertifikat tanah dari pemerintah kepada masyarakat melauai unggahan-unggahan dan *caption* yang ada di Instagram tersebut. Kedua, partisipasi publik (*public participation*), pada proses unggahan

mengenai pembagian sertifikat tanah terdapat dua klasifikasi respons dari masyarakat yaitu pembagain sertifikat tanah, mengenai respons-respons masyarakat yang berkaitan dengan proses pembagain sertifikat tanah dan kategori di luar pembagian sertifikat tanah, yaitu respons-respons masyarakat yang membahas masalah-masalah di luar pembagain sertifikat tanah. Respons-respons yang ada juga dijelaskan dari hasil wawancara dengan 10 netizen, berdasarkan hasil wawancara tertulis, masyarakat memberikan respons karena ingin berkontribusi menyampaikan pendapat kepada pemerintah, sehingga banyak berbagai macam respons-respons yang ada dan terbagi menjadi dua kategori respons. Masyarakat yang merespon juga setuju jika pembagian sertifikat tanah merupakan salah satu hal penting yang dipikirkan oleh pemerintah dan merasa jika pemberian informasi melalui unggahan di Instagram @jokowi tersebut memang kegiatan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi tidak semua berpendapat sama, ada juga yang berpendapat jika hal tersebut bisa benar-benar terjadi ataupun tidak karena masyarakat hanya dapat memantau melalui media bukan turun langsung memantau yang ada dilapangan.

Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi (*collaboration*), pada unggahan mengenai pembagian sertifikat tanah terdapat 2 video mengenai kolaborasi pemerintah dengan masyarakat yaitu video pertama yang berisikan proses pembagain sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat dan yang kedua adalah video salah satu contoh penjelasan langsung dari masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat tanah. Serta tujuan yang kelima yaitu penanggulangan resiko (*risk management*), berdasarkan bidang pemerintahan dalam negeri, upaya pemerintah untuk menanggulangi peningkatan *hoax* dengan penerapan undang-undang, menciptakan *e-Government* dan mengenalkan aplilasi '*Turn Back Hoax* untuk memeriksa dan memberikan laporan kepada pemerintah mengenai *hoax*. Pemerintah juga akan membangun sistem *big data cyber security* (BDCS), di mana dengan sistem ini seluruh data yang ada di kementerian atau lembaga disimpan dalam sistem data yang aman.

## 5.2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti terhadap proses komunikasi politik yang ada pada proses pembagain sertifikat tanah melalui media sosial Instagram adalah dengan menyediakan sesi komunikasi interaktif dengan masyarakat, seperti misalnya merespon beberapa respons-respons masyarakat yang ada di kolom komentar dan memanfaatkan aplikasi dengan fitur *live chat*. Hal tersebut bisa menjadi solusi agar masyarakat bisa lebih memberikan aspirasi baik kritik ataupun saran tentang perkembangan pemerintah Indonesia terlebih mengenai proses pembagian sertifikat tanah. Pada sesi *live chat* tersebut pemerintah juga bisa langsung merespon masyarakat atas aspirasi-aspirasi yang sudah mereka sampaikan agar terjadi proses komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dan membuat jarak antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih dekat.

